

Pencermatan GRC pada Perencanaan dan Penganggaran

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
20 Mei 2022

GRC dalam Perencanaan Penganggaran



KOMPONEN GRC

LEARN

L1	EXTERNAL CONTEXT
L2	INTERNAL CONTEXT
L3	CULTURE
L4	STAKEHOLDERS

ALIGN

A1	DIRECTION
A2	OBJECTIVE
A3	IDENTIFICATION
A4	ASSESSMENT
A5	DESIGN

PERFORM

P1	CONTROLS
P2	POLICIES
P3	COMMUNICATION
P4	EDUCATION
P5	INCENTIVES
P6	NOTIFICATION
P7	INQUIRY
P8	RESPONSE

REVIEW

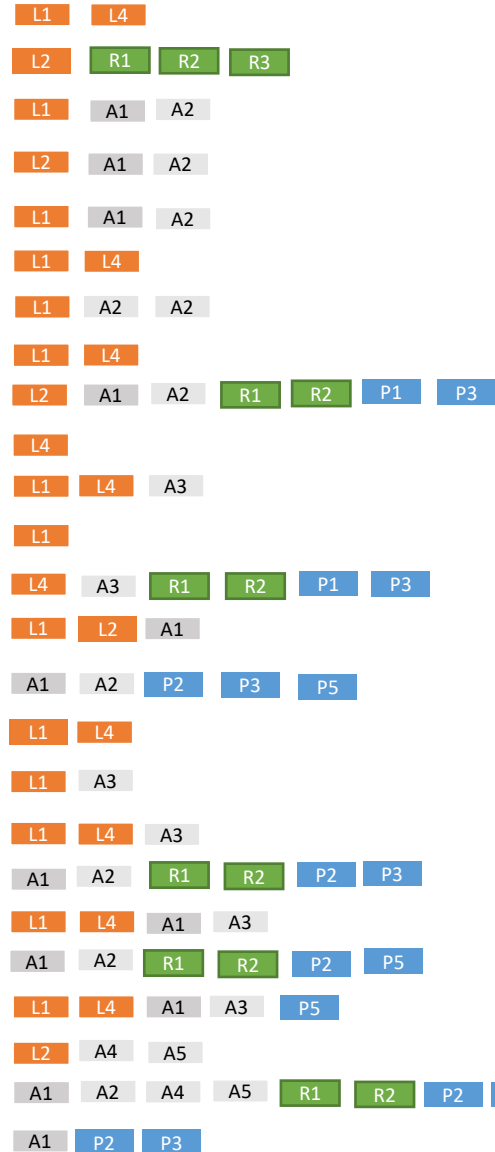
R1	MONITORING
R2	ASSURANCE
R3	IMPROVEMENT

PROSES PENYUSUNAN RKP (Eksternal)

KCI

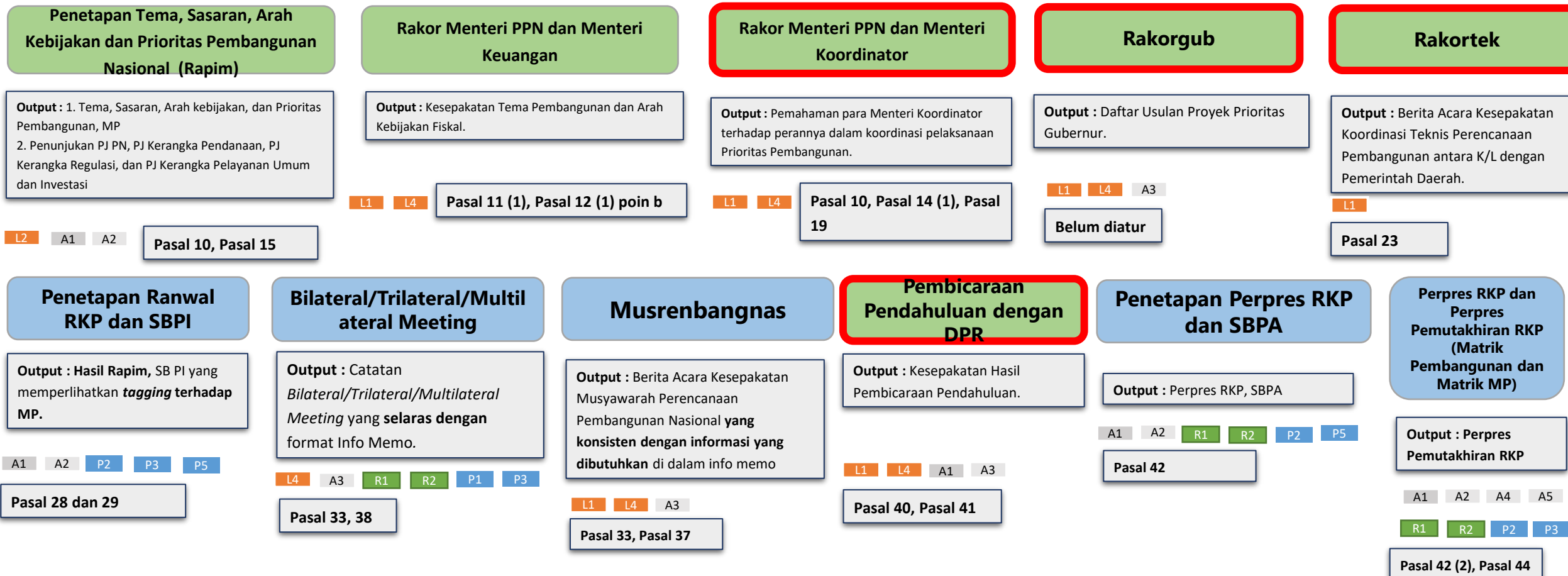
PROSES PENYUSUNAN RKP (Internal)

KCI



NB : Pemetaan dilakukan oleh tim IBKK dengan konfirmasi tim Grajosa

PROSES RKP YANG DIUSULKAN DAPAT MENJADI REFERENSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP



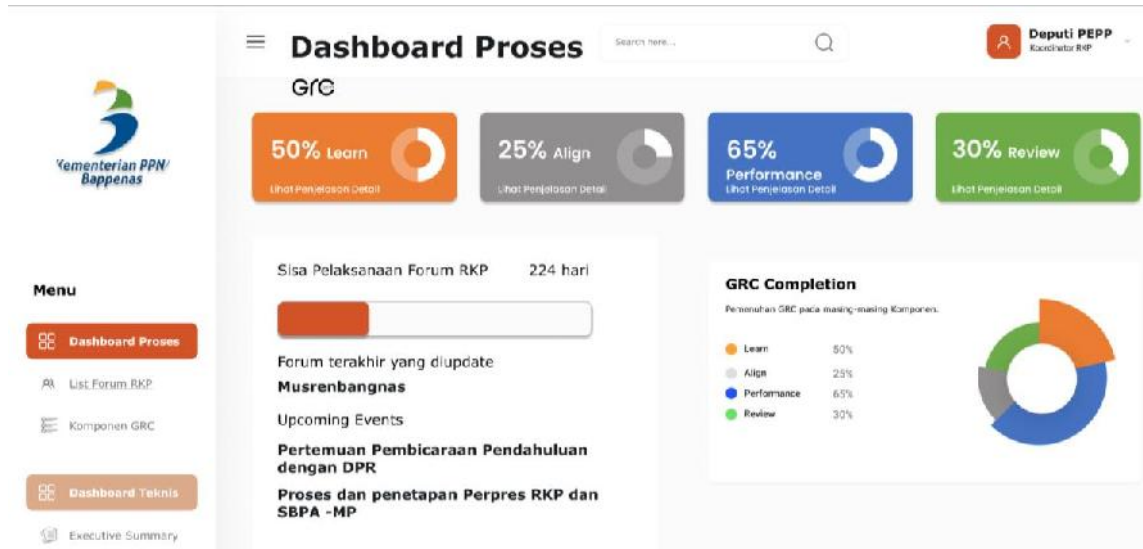
1. Sidang Kabinet belum diatur dalam Permen 5/2018 sehingga diusulkan menjadi bahan pertimbangan dalam Revisi Permen 5/2018 dan Permen 13/2018
2. Tinjau ulang angka dasar dalam Permen 5/2018 termasuk ke dalam Penyusunan SBPI
3. Reviu MP Belum diatur ke dalam Permen 5/2018

NB : Pemetaan dilakukan oleh tim IBKK dengan konfirmasi tim Grajosa

Sumber : Paparan Kunker IBKK, 2021, diolah



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



No	Forum Perencanaan RKP	Dasar Hukum	PIC	Status Tahapan	Status Capaian MP
01	Penetapan Tema, Sasaran, Arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan oleh Bappenas -MP	Pasal 10 dan 15 Permen 5/2018	Kedeputian PEPP	Completed	45/45
02	Rakor Menteri PPN dan Menteri Keuangan - MP	Pasal 11 dan 12 Permen 5/2018	Kedeputian PEPP Kedeputian Ekonomi	Completed	45/45
03	Rakor Menteri PPN dan Menteri Koordinator -MP	Pasal 10,14 dan 19 Permen 5/2018	Kedeputian PEPP	Completed	45/45
04	Rakorgub	-	Kedeputian Regional	Completed	45/45
05	Rakortekrenbang	Pasal 23 Permen 5/2018	Kedeputian Regional	Completed	45/45

[< previous](#)
[next >](#)

NB : Persentase hanya ilustrasi dan belum dilakukan pengukuran yang komprehensif
 NB : Dashboard masih bersifat mock up dalam proses pengembangan tim Pusdatin

GRC dalam Perencanaan Penganggaran

DOKUMEN EXSUM DAN INFOMEMO

EXECUTIVE SUMMARY	A. Latar Belakang Proyek	Kondisi Saat Ini	L1	L2	L4	A3	A5														
		Relevansi Proyek	L1	L2	L4	A1	A3	A5													
		Impact/Outcome Utama	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
	B. Deskripsi & Status Proyek	Struktur Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Profil Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Status Kesiapan, Kesiapan Kelembagaan & Regulasi Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P6	R1							
		Profil & Kesiapan Pendanaan Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P5	P6	R1						
	C. Dampak Proyek & Project Roadmap	Dampak Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Project Roadmap	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1	R3							
		Risiko MP	L1	L2	L3	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P2	P3	P8	R1	R2	R3			
PROJECT INFO MEMO	A. Latar Belakang	Kondisi Saat Ini	L1	L2	L4	A3	A5														
		Relevansi Proyek	L1	L2	L4	A1	A3	A5													
		Impact/Outcome Utama	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
	B. Deskripsi & Status Proyek	Struktur Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Profil Spasial Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Profil Integratif Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Profil & Kesiapan Pendanaan Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P5	P6	R1						
		Profil & Kesiapan Kelembagaan	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P6	R1							
		Profil & Kesiapan Regulasi	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P6	R1							
		Profil & Kesiapan Teknis Proyek	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P6	R1							
		Project Maturity																			
	C. Dampak Proyek	Kerangka Logis Dampak	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
		Simulasi Dampak	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1								
	D. Roadmap & Timeline	Roadmap	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A5	P1	P3	P6	R1	R3							
		Timeline	L1	L2	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P3	P6	R1	R3						
	E. Risiko	Profil & Rencana Mitigasi Risiko	L1	L2	L3	L4	A1	A2	A3	A4	A5	P1	P2	P3	P8	R1	R2	R3			

KOMPONEN GRC

LEARN

L1	EXTERNAL CONTEXT
L2	INTERNAL CONTEXT
L3	CULTURE
L4	STAKEHOLDERS

ALIGN

A1	DIRECTION
A2	OBJECTIVE
A3	IDENTIFICATION
A4	ASSESSMENT
A5	DESIGN

PERFORM

P1	CONTROLS
P2	POLICIES
P3	COMMUNICATION
P4	EDUCATION
P5	INCENTIVES
P6	NOTIFICATION
P7	INQUIRY
P8	RESPONSE

REVIEW

R1	MONITORING
R2	ASSURANCE
R3	IMPROVEMENT

NB : Pemetaan dilakukan oleh tim IBKK dengan konfirmasi tim Grajosa



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



Dashboard Teknis

GRC

75 % Learn [Lihat Penjelasan Detail](#)

70 % Align [Lihat Penjelasan Detail](#)

65 % Perform [Lihat Penjelasan Detail](#)

73 % Review [Lihat Penjelasan Detail](#)

Isian yang perlu perbaikan

Konsistensi Rincian Output Alokasi Major Projects Sumber Pendanaan

[Lihat semua](#)

GRC Completion

70%

Deputi PEPP
Koordinator RKP

List Major Projects

01

Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas

Fokus pada industri 6 subsektor prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, serta alat kesehatan

80% LEARN 80% ALIGN 80% PERFORM 80% REVIEW
80% GRC Completed

[View](#)

02

Destinasi Pariwisata Prioritas

10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

80% LEARN 80% ALIGN 80% PERFORM 80% REVIEW
80% GRC Completed

[View](#)

03

Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Kawasan Industri Prioritas KI Smelter sesuai RPJMN 2020-2024

80% LEARN 80% ALIGN 80% PERFORM 80% REVIEW
80% GRC Completed

[View](#)

04

Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Petani dan nelayan perlu didorong tidak hanya menguasai sektor on farm, namun dapat menguasai bisnis proses terutama di sektor pasca panen dimana memberikan keuntungan yang lebih besar

80% LEARN 80% ALIGN 80% PERFORM 80% REVIEW
80% GRC Completed

[View](#)

05

Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi

Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 15,7 persen. Intensitas energi primer sebesar 136,6 SBM/Miliar Rupiah dan Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 10,58 persen terhadap Baseline (BAU).

80% LEARN 80% ALIGN 80% PERFORM 80% REVIEW
80% GRC Completed

[View](#)

NB : Dashboard masih bersifat mock up dalam proses pengembangan tim Pusdatin

NB : Persentase hanya ilustrasi dan belum dilakukan pengukuran yang komprehensif



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



Major Projects 29 - Pelabuhan Utama Terpadu



B. Deskripsi dan Status Proyek

Cascading Proyek



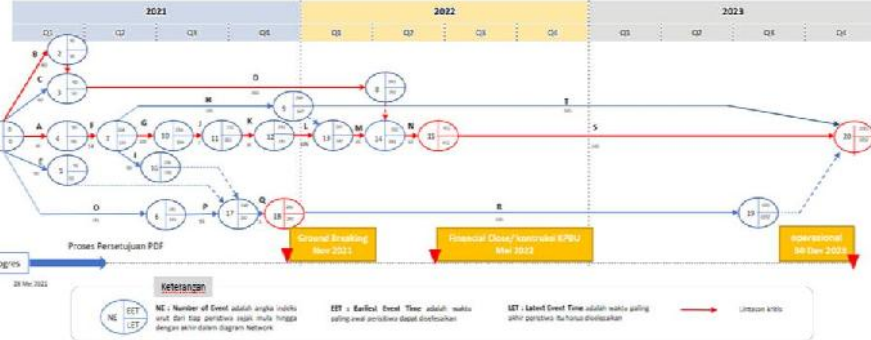
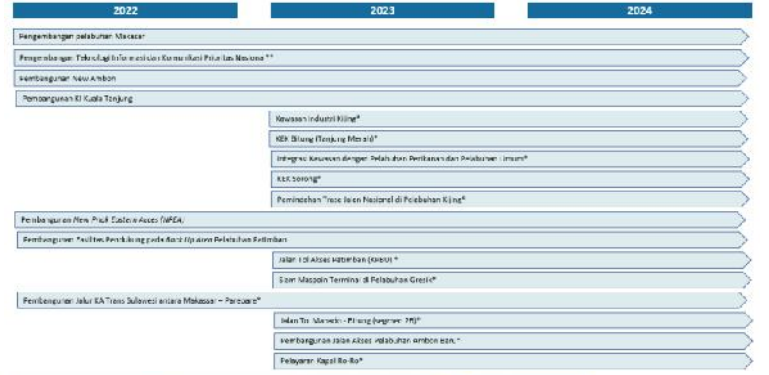
Profil Proyek

Lokasi & Luas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan : Belawan, Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priuk, Patimban, Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Ambon Baru, Sorong Provinsi : Jawa Barat Kota/ Kab : Kab. Subang, Kota Ambon 	Status Kesiapan	Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung, TJ Priuk, TJ Perak, Patimban, Makassar, Kijing, Bitung, Sorong dalam tahap operasi dan pengembangan. Pelabuhan Baru di Ambon dan NTT dalam tahap kajian persiapan pembangunan.
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Proyek <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Pelindo (I,II,III, & IV) Badan Usaha dan Swasta Kementerian Perhubungan Lintas K/L/D: <ul style="list-style-type: none"> Menkomarves Menka Ekonomi Kemenkeu Kementerian PUPR Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan INSA dan Jasa Logistik 	Kesiapan Regulasi	Diusulkan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Profil dan Kesiapan Pendanaan

Estimasi Kebutuhan Pendanaan 2022	Rp. 15.646,74 Miliar	Kesiapan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan posisi saat ini dalam proses pemenuhan pendanaan Menyebutkan persor nominal pendanaan yang sudah didapatkan
Sumber Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> APBN (RM, SBSN, PLN, LMAN) BUMN 		

Lihat Detail



Analisis Risiko (Sumber)

No.	Jenis Risiko	Skenario Baik	Dampak Baik	Mitigasi Baik	Tanggal Pelaksanaan
1.	Keterserapan dan cakupan biaya pelaksanaan lahan	Risiko ini dapat berupa keterlambatan dan kenaikan biaya akibat proses pembebasan lahan yang berkepanjangan. Berdasarkan rencana lokasi, terdapat bahwa kondisi lahan yang akan digunakan cukup pengembangannya belumlah Ambon Baru berada pada kategori dengan elevasi di atas 2 m (diukur hingga air pasang). Situasi kondisi lahan yang berbukit tersebut, pembangunan Pelabuhan Ambon Baru ini juga diantisipasi membebankan reklamasi lahan untuk perataan area.	Proyek tertambat sebagian atau seluruhnya	Penggunaan Sistem Project financing (mekanisme pendirian SPK)	
2.	Risiko Lokasi	Risiko yang disebabkan dari masalah pemondasian lahan, kondisi tanah, serta kondisi lingkungan sekitar.	Proyek tertambat sebagian atau seluruhnya	Konfirmasi dengan studi Analisis Manajerial Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baik dan melaksanakan validasi dan pemantauan status kelestarian tanah.	
3.	Risiko Desain, Konstruksi, dan Operasional	Risiko yang disebabkan oleh keterlambatan koordinasi output, keterlambatan kerja, kenaikan biaya konstruksi, kesalahan desain, keterlambatan waktu konstruksi dan kesalahan estimasi waktu dan biaya.	Proyek mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya konstruksi	Mengusulkan sistem nilai yang jelas, melakukan studi pemantauan kinerja dan kesesuaian harga yang baik, melakukan perhitungan faktor eskalasi harga di dalam kontrak, sistem koordinasi & koordinasi kontraktor, koordinasi pengumpul, dan operator yang tepat.	
4.	Risiko Finansial	Pengajuan anggaran, financial close, risiko pemecatan VAB, risiko nilai energi, dan risiko asuransi	Proyek tertambat sebagian atau seluruhnya serta tertaji pembengkakan biaya	Perencanaan modal proyek dengan mengkomodifikasi tingkat agar pemenuh pinjaman bank dilakukan, selain itu, menciptakan kemitraan yang baik dan koordinasi dengan pembiayaan yang kredibel dan akses al akan mengoptimalkan nilai. Untuk pemenuh pinjaman dapat diidentifikasi sebagai sisi pengumpulan modal positif yang didukung oleh 70%.	
5.	Risiko Operasional	Pengajuan anggaran proyek, ketersediaan layanan, kenaikan biaya, kesalahan estimasi biaya lifecycle, keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Ketidaksesuaian rencana finansial terhadap kondisi di lapangan	Membuka kontraktor dan operator yang kredibel, memastikan manajemen operasional dilakukan secara profesional, memastikan kontrak dengan vendor sesuai spesifikasi, memiliki kebijakan yang fleksibel dan terbuka yang tepat.	

NB : Persentase hanya ilustrasi dan belum dilakukan pengukuran yang komprehensif
Sumber : Executive Summary MP Pelabuhan Utama Terpadu



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SAMPLE MP PELABUHAN UTAMA TERPADU (AMBON)



L1

External Context

Identifikasi kondisi kebutuhan, masukan, demand dari Presiden, Pimpinan, K/L/D terkait

Rakor oleh Kemenkomarves (24 Feb 2021)

Pembahasan Maluku-Lambung Ikan Nasional. Pelabuhan Ambon Baru dicanangkan mendukung program tersebut. Dalam rapat ini juga membahas sasaran, latar belakang proyek, rencana lokasi, dan timeline pelaksanaan proyek.

File : 1. 20210224 Bahan Rakor MLIN Kemenkomarves - Kemenkomarves.pdf

Rakor Teknis Eselon I dengan Kemenkomarves, Kemenhub dan KKP (22 November 2021)

Pembahasan tindak lanjut dan percepatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dengan kesimpulan perlunya pembentukan *Steering Committee* lintas Kementerian untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru Terpadu.

File : 2. 20210224 Bahan Rakor MLIN Kemenkomarves - Kemenhub.pdf

Rakor Pelabuhan Ambon (31 Agustus 2021)

Dalam rapat tersebut Menkomarves mengusulkan **kerja sama investasi** dengan China Harbour, Menhub mengusulkan penugasan ke PT Pelindo serta kerja sama melalui inbreng aset, dan KKP mengusulkan kerja sama dengan **memberikan hak penangkapan ikan** terukur di Perairan Maluku kepada investor Pelabuhan Ambon Baru. Pada rakor ini dibahas terkait skema KPBU, K/L Pelaksana, Desain teknis Proyek, Penuntasan Kajian dan Koordinasi dengan stakeholders daerah.

File : 5a. 20210831 Bahan Rakor Ambon Menkomarves - Menkomar.pdf 5b. 20210831 Bahan Rakor Ambon Menkomarves - MENHUB.pdf 5c. 20210831 Bahan Rakor Ambon Menkomarves - KKP.pdf 5d. 20210831 Bahan Rakor Ambon Menkomarves - PUPR.pdf

Rapat Bappenas dengan PT SMI (29 September 2021)

Penentuan beberapa opsi bentuk skema KPBU dengan salah satunya adalah opsi penunjukan kepada PT Pelindo sebagai Master Developer dengan menggandeng mitra investasi.

File : 7. 20210929 Usulan indikasi struktur ambon 30092021.pdf

Rakor Teknis Eselon I dengan Kemenkomarves, Kemenhub dan KKP (22 November 2021)

Pembahasan tindak lanjut dan percepatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dengan kesimpulan perlunya pembentukan *Steering Committee* lintas Kementerian untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru Terpadu. Pada rapat ini dibahas juga Pembiayaan Proyek, Struktur KPBU, Pembentukan tim Pengarah, Kajian PDF

File : 8. 20211122 Draft Bahan Paparan Ambon tk. es. 1.pdf

Dokumen administrasi lain yang diperlukan :



Surat Undangan



Notulensi



Daftar hadir



Dokumen Adm. Lain

NB : Yang ditampilkan dalam slide untuk kepentingan contoh dan hanya beberapa rapat saja yang dilakukan untuk penajaman MP Pelabuhan Utama Terpadu



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SAMPLE MP PELABUHAN UTAMA TERPADU (AMBON)



L2

Internal Context

Arahan rapim, keputusan Menteri, Deputi, dan pimpinan Internal lain

Rapim terkait MP Pelabuhan Ambon Baru (2 Mar 2021)

Pada Rapim ini disampaikan perkembangan perencanaan Pelabuhan Ambon Baru beserta untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri dan indikasi hasil Kajian FS PT Pelindo oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Pada rapim ini juga dibahas latar belakang proyek, skema pendanaan, dan susunan tim Pengarah.

File :  2. 20220302 Presentasi Sarpras Rapim Pelabuhan Ambon.pdf 

Rapim terkait MP Pelabuhan Ambon Baru – Skema KPBU (13 April 2021)

Disampaikan perkembangan perencanaan Pelabuhan Ambon Baru dengan memaparkan opsi struktur KPBU unsolicited Pelabuhan Perikanan dan pengintegrasian dengan pelabuhan umum existing.

File :  3. 20220413 Rapim Ambon.pdf 

Dokumen administrasi lain yang diperlukan :



Surat
Undangan



Notulensi



Daftar hadir



Dokumen
Adm. Lain

NB : Yang ditampilkan dalam slide untuk kepentingan contoh dan hanya beberapa rapat saja yang dilakukan untuk penajaman MP Pelabuhan Utama Terpadu



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SAMPLE MP PELABUHAN UTAMA TERPADU (AMBON)



L3

Culture

Koordinasi dengan unit kerja sektor lain



Rapat Teknis Pembangunan Pelabuhan (Januari 2021)


Penyusunan draft Tim Teknis Pelabuhan Ambon pada Januari 2021 yang terdiri dari Direktorat Transportasi, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Direktorat Regional 3, dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan untuk menindaklanjuti arahan perencanaan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru untuk selanjutnya dilaporkan ke masing-masing deputi terkait. Pada rapat ini dibahas isu strategis dan rekomendasi pembangunan Pelabuhan Baru.

File :  1. Draft Tim Teknis Pelabuhan Ambon dan Kupang Terpadu.pdf 

Rapat Teknis MP level Eselon II (13 April 2021)

Pada rapat tersebut disampaikan pro dan kontra opsi KPBU Solicited & Unsolicited, Tahapan Pelaksanaan KPBU, Peran K/L Pelaksana dan timeline pelaksanaan Major Projects tersebut.

File :  2. 20210426 Skema KPBU Pelabuhan New Ambon _Bappenas.pdf 

 2. solicited vs unsolicited.pdf 

Dokumen administrasi lain yang diperlukan :



Surat
Undangan



Notulensi



Daftar hadir



Dokumen
Adm. Lain

NB : Yang ditampilkan dalam slide untuk kepentingan contoh dan hanya beberapa rapat saja yang dilakukan untuk penajaman MP Pelabuhan Utama Terpadu



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SAMPLE MP PELABUHAN UTAMA TERPADU (AMBON)



L4

Stakeholders

Memahami kebutuhan K/L/D, Forum-forum dengan K/L/D (Forum-forum tambahan terkait MP)

Rakortekrenbang (21 Februari - 8 Maret)

Bappeda Maluku - Kebutuhan kapal penyebrangan perintis di MBD. Layanan lintasan terlalu panjang saat ini, sehingga menunggu terlalu lama - Mengusulkan pengadaan kapal dan rute lintasan akan di usulkan ke Kemenhub

Dit Transportasi Bappenas - Saat ini sudah ada layanan keperintisan Pulau Wetar-Kisaran-Moa. Pengembangan keperintisan akan menyusul. Untuk pengadaan kapal masih moratorium. Latar belakang pelabuhan ambon adalah rencananya pengembangan pelabuhan di sekitar Ambon yang sudah dicantumkan di dalam Blue Book Revisi dan sudah masuk ke Green Book, nama Program nya adalah Eastern Port Led Development. Telah sesuai dengan kajian World Bank.

Kemenhub - Tahun 2022 tidak ada usulan pengadaan kapal. terakhir ada kegiatan pengadaan kapal di tahun 2019



Berita Acara Rakortekrenbang Desk Provinsi Maluku

Rakorgub (21 Maret)

Pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) sebagai pendukung dari Major Projects (MP) Jaringan Pelabuhan Terpadu, yang perlu didukung oleh Pemda Provinsi Maluku melalui :

- Revitalisasi Pelabuhan feeder yang tidak beroperasi di 7 Kab/Kota (Ambon, Tual, Maluku Tengah, Buru, Tanimbar, MBD dan Aru.
- Pematangan rencana pembenihan pada sektor perikanan budidaya



Bahan Paparan Rakorgub Wilayah 3 : Sulawesi, Nusra, Maluku, dan Papua

Dokumen administrasi lain yang diperlukan :



Surat Undangan



Notulensi



Daftar hadir



Dokumen Adm. Lain

NB : Yang ditampilkan dalam slide untuk kepentingan contoh dan hanya beberapa rapat saja yang dilakukan untuk penajaman MP Pelabuhan Utama Terpadu



TINDAK LANJUT PENERAPAN GRC DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SAMPLE MP PELABUHAN UTAMA TERPADU (AMBON)




A5

Design

Menyusun desain proyek secara detail dan identifikasi critical path proyek

Kondisi Saat Ini

Fakta , Data Terkait Kondisi Saat Ini, dan inti sari latar belakang	Rencana Pengembangan Proyek
 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya logistik hingga kini masih mahal, 24% dari total PDB nasional. ➢ Pelabuhan simpul peti kemas yang belum mampu menampung kapal besar ➢ Kawasan yang belum terkoneksi dengan infasruktur konektivitas yang memadai ➢ Belum adanya sistim data untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal. 	<p>Segmentasi Penerima Manfaat: Pengelolaan Pelabuhan, Jasa Logistik dan Pelayaran, Jasa industri dan perdagangan.</p>

Intisari Latar Belakang

- Belum optimalnya standarisasi pola operasional dan infrastruktur pelabuhan di pelabuhan simpul
- Volume muatan masih rendah untuk di containerkan
- Belum terintegrasi dengan kawasan ekonomi
- Jalur pelayaran belum terbentuk konsolidasi rute (loop) secara optimal

No	Kegiatan	Durasi (Hari)	End
A	Pencetakan Lokasi	90	1-Jun-21
B	Pengusutan PSN	60	
C	Perencanaan KPBU (Studi Pendahuluan, Dok Perencanaan, Pengadaan Tanah, Konsultasi Publik, Tim KPBU, Surat Permohonan Fasilitas dan Kontainer dan PMPK)	90	1-Jun-21
D	Proses hibah lahan perda (demaga penyederhanaan) ke Kemenhub	90	
E	Penyusunan Basic Design	181	31-Aug-21
F	Persetujuan PDF dari Kemenkeu	14	15 Jun 21
G	Pelaksanaan Pembibasan Lahan oleh LMAN	302	30 Mar 21
H	Dokumen Perencanaan (DS, RIP, ARAP)	196	
I	Penyajian KPBU (CEO, F&C)	100	23-Sep-21
J	Rekomendasi Keayaktan dari Dappenas	7	30-Sep-21

No	Kegiatan	Durasi (Hari)	End
K	Proses KSPH	30	30-Oct-21
L	Transaksi KPEU (Pelitangan, Penetapan Pemenang)	108	13-Feb-22
M	Perundingan/penyusunan Kontak KPBU (termasuk pembentukan BUP)	45	30-Mar-22
N	Finansi: Close (Mei 2022)	60	29-May-22
O	Dokumen Lingkungan AMDAL	90	
P	Pelelangan Kontraktor Design & Build (APBN)	61	31-Oct-21
Q	Ground Ereaking (November 2021)	1	01-Nov-21
R	Konstruksi Design & Build (APBN)	800	
S	Konstruksi KPBU (Operasional Desember 2023)	550	30 Dec 23
T	Durungan Jalan Akses	655	30 Dec 23

Lokasi & Luas Lahan	Pelabuhan : Belawan, Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Patimban, Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Ambon Baru, Sorong. Provinsi : Jawa Barat Kota/ Kab. : Kab. Subang, Kota Ambon	Status Kesiapan Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung, Tj Priok, Tj. Perak, Patimban, Makassar, Kijing, Bitung, Sorong dalam tahap operasi dan pengembangan. Pelabuhan Baru di Ambon dan NTT dalam tahap kajian persiapan pembangunan
Kelembagaan	Penanggung Jawab Proyek - Pemerintah Daerah - Palindo I, II, III, & IV - Badan Usaha dan Swasta - Kementerian Perhubungan	
	Lintas K/L/D: - Menkomarves - Menko Ekonomi - Kemenkeu - Kementerian PUPR - Kementerian Perindustrian - Kementerian Perdagangan - INSA dan Jasa Logistik	Kesiapan Regulasi Diusulkan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

NB : Yang ditampilkan dalam slide untuk kepentingan contoh dan hanya beberapa desain Exsum MP Pelabuhan Utama Terpadu





Terimakasih

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Kementerian PPN/Bappenas

lbkk.bappenas@gmail.com